

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

A. Profil dan Letak Geografis Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat $111^{\circ}17'$ - $111^{\circ}52'$ BT dan $7^{\circ}49'$ - $8^{\circ}20'$ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek⁶⁴

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun

⁶⁴ <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/192> dilihat pada 15 november 2016 jam 20.30 wib

hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata tertinggi $32,2^{\circ}\text{C}$ dan suhu rata-rata terendah $23,9^{\circ}\text{C}$.

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi menjadi 279 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.⁶⁵



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Ponorogo

Keterangan:

⁶⁵ <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/199> dilihat pada tanggal 15 november 2016 jam 20.50 wib

Tabel 2.1. Data Kecamatan Kabupaten Ponorogo

1. Kecamatan Ponorogo	12. Kecamatan Pudak
2. Kecamatan Siman	13. Kecamatan Sooko
3. Kecamatan Mlarak	14. Kecamatan Sawoo
4. Kecamatan Jetis	15. Kecamatan Sambit
5. Kecamatan Balong	16. Kecamatan Bungkal
6. Kecamatan Kauman	17. Kecamatan Ngrayun
7. Kecamatan Sukorejo	18. Kecamatan Slahung
8. Kecamatan Babadan	19. Kecamatan Jambon
9. Kecamatan Jenangan	20. Kecamatan Badegan
10. Kecamatan Ngebel	21. Kecamatan Sampung
11. Kecamatan Pulung	

B. Sejarah

Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu Wengker dipimpin oleh Suryo Ngalam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden

Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman.

Tahun 1482-1486 M, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten didukung semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV, dan ia menjadi adipati yang pertama.

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batara Katong dan juga mengacu pada buku *Hand book of Oriental History*. Pada batu gilang tersebut tertulis candrasengkala memet berupa gambar manusia yang bersemedi, pohon, burung garuda dan gajah. Candrasengkala memet ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 M sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka bertepatan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H. Selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan

tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo dibawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang.

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada tanggal 11 Agustus 1496, Bathara Katong dinobatkan sebagai Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan sebanyak 16 kali.

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan Suro (Muharram), Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Dalam pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel.

C. Demografi

Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada Sensus penduduk tahun 2010 adalah 855.281 yang terdiri atas 427,592 pria dan 427,689 wanita dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,97 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333 jiwa/km² dan yang paling rendah adalah kecamatan Puduk yaitu sebanyak 182 jiwa/km².

D. Pendidikan

Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Nurcholis Madjid, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin dan Hidayat Nurwahid. Pesantren yang tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk tahun 2008 berjumlah 58 pesantren.

Selain pesantren, terdapat pula pendidikan formal negeri maupun swasta. Berikut ini adalah data pendidikan formal di kabupaten Ponorogo dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2011/2012:

Tabel 2.2 Tabel Sekolah Di Kabupaten Ponorogo

Pendidikan formal	TK atau RA	SD atau MI	SMP atau MTs	SMA atau MA	SMK	Perguruan tinggi	Lain-lain
Negeri	13	625	63	20	7	0	1
Swasta	617	88	108	57	25	4	7
Total	630	713	171	77	32	4	8

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2016

E. Pemerintahan

1. Kepala Daerah

Berikut nama-nama bupati Ponorogo sejak 1944:

Table 2.3 daftar nama bupati ponorogo yang pernah menjabat

No	Nama Bupati Ponorogo	Masa Jabatan
1	R. Soesanto Tirtoprodjo	1944 – 1945
2	R. Tjokrodiprodjo	1945 – 1949
3	R. Prajitno	1949 – 1951
4	Mayjen TNI R. Moehamad Mangoendipradja	1951 – 1955
5	R. Mahmoed	1955 – 1958
6	R.M. Harjogi	1958 – 1960
7	R. Dasoeki Prawirowasito	1960 – 1967
8	R. Soejoso	1967 – 1968
9	R. Soedono Soekirdjo	1968 – 1974
10	H. Soemadi	1974 – 1984
11	Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo	1984 – 1989
12	Drs. R. Gatot Soemani	1989 – 1994
13	DR. H.M. Markum Singodimedjo	1994 – 2004
15	H. Muryanto, SH, MM	2004 – 2005
16	H. Muhadi Suyono, SH, Msi	2005 – 2010
17	H. Amin, SH	2010 – 2015
18	Drs. H. Ipong Muchlissoni	2016 - sekarang

2. Masa Pemerintahan Bapak H. Amin S.H (2010-2015)

Bapak H. Amin S.H lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 7 Agustus 1953. Ia dilantik pada 12 Agustus 2010. Ia bersama pasangannya Yuni Widyaningsih berhasil memenangkan pilkada Ponorogo setelah mengalahkan dua pasangan lainnya yakni pasangan petahanan H Muhadi Suyono-Yusuf Pribadi dan Supriyanto-Nyamut Suseno. Ia dinilai berhasil membangun Kabupaten Ponorogo hal ini ditandai dengan berbagai proyek seperti Ponorogo City Center (PCC), Renovasi panggung utama dan paseban di Alun-Alun, Monumen Bantarangin di Sumoroto, Gedung Terpadu Lantai 6 di bekas lahan terminal lama dan renovasi pendopo agung.

Riwayat pendidikan yang ditempuhnya yaitu SD Semanding 1 (1961-1967), Upers SMP di Surabaya (1984-1987), Paket C setara SMU (1999-2002), dan Unmer Ponorogo (2005-2009). Bapak Amin juga tergolong aktif dalam organisasi yang ditunjukkan dari berbagai pengalamannya antara lain Ketua GP Ansor di Kecamatan Kauman (1975-1980), Ketua KNPI kecamatan Kauman (1982-1987), Ketua KUD Bantarangin kecamatan Kauman (1990-sekarang), Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Ponorogo (2000-2005), Ketua Perwakilan Puskud Jawa Timur wilayah Ponorogo (2004 s/d sekarang), dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Ponorogo (2004 s/d sekarang).

Selain itu, pengalaman jabatan juga dimiliki mantan Bupati Ponorogo 2010-2015 tersebut yaitu Kepala Desa Tosanan (periode 1990-1998, 1998-2006), Wakil Bupati (2005-2010), Ketua PMI Cabang Ponorogo (2005-2010), Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Ponorogo (2006-2011), Ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) (2006-2010), Ketua Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (2007-2010), dan Bupati Kabupaten Ponorogo (2010-2015).

3. Gambaran Kasus Korupsi di Kabupaten Ponorogo

Salah satu kasus korupsi di lembaga publik yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah kasus di Ponorogo yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pejabat Humas Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri setempat dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nama pejabat itu adalah Didik Setyawan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Marem, Kepala Sub Bagian Humas yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Modus penyelewengan dana terjadi di tiga sub bagian yakni, humas, protokol, dan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 senilai Rp 1,4 miliar dan 2014 sebanyak Rp 1,5 miliar. Uang itu digunakan untuk perjalanan dinas, pemuatan iklan di media massa, dan pemasangan baliho sosialisasi sebuah program pemerintah. Pengakuan

tersangka yaitu melakukan mark-up sebagian anggaran dan membuat laporan fiktif. Berdasarkan hasil penyidikan, motif dari penyelewengan anggaran itu ada pejabat yang meminta setoran uang kepada tersangka. Mereka mengambil sebagian anggaran kegiatan di bagian humas dan protokol untuk diserahkan ke pejabat tersebut secara tunai dan bertahap.⁶⁶

Selain korupsi yang melanda anggaran hubungan masyarakat dan protocol, ada juga kasus yang menjerat mantan Wakil bupati Kabupaten Ponorogo dengan kasus korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) di Kabupaten Ponorogo. Disini Yuni Widiyaningsih mantan wakil bupati kabupaten ponorogo periode 2010-2015 merupakan salah satu tersangka dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2012 dan 2013 yang senilai 8,1 M yang merugikan Negara sebesar 4,5 M.

Dalam menangani dugaan korupsi DAK bidang pendidikan ini, jaksa menetapkan sembilan tersangka. Selain Yuni Widiyaningsih ada tujuh di antaranya sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Supeno; Staf Dinas Pendidikan Ponorogo Son Sudarsono dan Marjuki. Selain itu, Direktur CV Global Inc Nur Sasongko selaku rekanan Dinas Pendidikan Ponorogo dan dua staf perusahaan, yaitu Keke Aji Novalyn dan Anang Prasetyo juga telah menjadi terdakwa. Seorang lagi yang telah berstatus

⁶⁶ Nofika Dian Nugroho, 2015, "Korupsi di Ponorogo, Pejabat Minta Setoran Bawahan", <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/21/058651630/korupsi-di-ponorogo-pejabat-minta-setoran-bawahan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2016 pukul 08.30 WIB

terdakwa adalah Hartoyo makelar proyek DAK bidang pendidikan. Adapun dua lainnya masih berstatus sebagai tersangka, yakni Yuni dan bekas Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Ponorogo Yusuf Pribadi. Peran tersangka Yuni sebagai pengendali untuk mendapatkan *fee* dari proyek DAK.⁶⁷

Dalam kasus ini Yuni berperan sebagai pengendali untuk mendapatkan *fee* dari proyek yang ada. Sebelum terjadinya proyek Yuni melakukan pertemuan dengan Direktur CV. Global Inc Nur Sasongko untuk melakukan tawar menawar untuk memenangkan lelang tender pengadaan alat peraga di 164 sedolah dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013⁶⁸. Dan untuk diketahui, penyidik Kejari Ponorogo sudah menetapkan mantan Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih sebagai tersangka sejak akhir 2014 lalu dalam kasus tersebut. Ia dijadikan tersangka lantaran dituding mengondisikan proyek pengadaan peralatan peraga bidang pendidikan dengan meminta keuntungan 22 persen atau Rp 1,7 miliar dari nilai proyek Rp 8,1 miliar untuk memenangkan tender CV Global Inc.⁶⁹

Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Bapak Bupati H. Amin, SH mempunyai misi pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo periode 2010-2015 yang bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Negeri

⁶⁷ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688221/korupsi-dana-alokasi-jaksa-cekal-wakil-bupati-ponorogo>

⁶⁸ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688221/korupsi-dana-alokasi-jaksa-cekal-wakil-bupati-ponorogo>

⁶⁹ *Ibid*
<http://regional.kompas.com/read/2016/10/27/20431501/tak.hadiri.panggilan.penyidik.tersangka.mantan.wabup.ponorogo.mengaku.sakit>

Ponorogo dalam rangka memberantas korupsi di kabupaten Ponorogo. Kasus yang menyeret sebagian anggota pejabat publik merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi dalam masa kepemimpinan Kepala Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri untuk mewujudkan misi tersebut. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan Kepala Bupati periode 2010-2015 dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo tahun 2015.